

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dunia sedang memasuki era digital – suatu situasi di mana segala sesuatu yang mendukung kehidupan umat manusia mengalami perubahan secara masif. Era digital merupakan suatu realitas yang tidak dapat disangkal sebab era baru ini telah memudahkan manusia dalam pelbagai lini kehidupannya. Perubahan yang diinisiasi oleh era digital tak boleh dipandang sebelah mata. Perubahan ini dapat meliputi semua segi kehidupan manusia, yaitu perubahan dalam cara berpikir dan berinteraksi dengan sesama warga menjadi semakin rasional; perubahan dalam sikap dan orientasi kehidupan ekonomi menjadi makin komersial; perubahan tata cara kerja, perubahan dalam kelembagaan dan kepemimpinan masyarakat yang makin demokratis dan lain-lainnya.¹

Ketika berbicara tentang tatanan dunia saat ini, tak ada satupun hal yang luput dari pengaruh digitalisasi. Pelbagai lini kehidupan manusia mulai dari ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan agama sekalipun telah mengafirmasi bahwa digitalisasi merupakan suatu realitas yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan umat manusia. Secara utuh, ungkapan tersebut mengalami pembenaran ketika dunia dilanda krisis akibat pandemi Covid-19. Kita dapat melihat bahwa tumbuhnya ekonomi, lancarnya konektivitas antarmanusia dan pelbagai kegiatan lainnya hanya dapat dijalankan dengan bantuan alat komunikasi yang merupakan konsekuensi logis dari era digital itu sendiri. Kemajuan alat komunikasi yang kita nikmati sekarang ini seyogianya merupakan suatu hal yang patut diapresiasi. Namun, dalam artian tertentu, kemajuan alat komunikasi dapat mendatangkan pelbagai persoalan.

Kita harus mafhum bahwasanya bahasa Indonesia di tengah kepegangan globalisasi sedang dihadapkan dengan aneka persoalan yang merongrong

¹ Abd. Rasyid Masri, *Sosiologi: Konsep dan Asumsi Dasar Teori Utama sosiologi* (Makassar: Alauddin Press, 2009), hlm. 87.

kedaulatannya. Di era disrupsi, bahasa sangat rentan dimanfaatkan sekadar sebagai pelayanan operasional aneka inovasi dan teknologi. Dan ini menjadi bencana bagi negara-negara yang kurang produktif.² Kita semestinya sadar bahwa negara-negara yang lebih produktiflah yang mempunyai peluang dan pengaruh dalam menyebarkan bahasanya. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Sebagai negara yang belum seutuhnya produktif dalam bidang teknologi, Indonesia sudah seharusnya mulai waswas dengan nasib bahasanya di masa yang akan datang. Boleh jadi, nasib bahasa Indonesia akan mengalami kepunahan akibat mentalitas para penuturnya yang secara perlahan mulai meninggalkan bahasanya. Kita harus kritis bahwasanya nasib suatu bahasa itu ekuivalen dengan para penuturnya. Bahasa akan mengalami kepunahan apabila tidak ada para penuturnya lagi. Hal ini semestinya harus menjadi perhatian yang amat serius dan perlu dipikirkan bersama.

Bahasa Indonesia sedang berhadapan dengan bahaya yang mengguncang kedaulatannya. Bahaya ini nyata dalam perilaku dan gaya para penutur bahasa Indonesia yang mencampuradukkan bahasa Indonesia dengan kosakata bahasa Inggris. Tak sebatas itu, adapun praktik berbahasa yang mengancam kedaulatan bahasa Indonesia antara lain, penyerapan bahasa atau istilah asing ketimpangan menyerap kosakata bahasa daerah, rendahnya minat para penutur bahasa Indonesia dalam menguasai bahasa Indonesia secara baik dan benar serta pelbagai aneka persoalan lainnya. Fenomena di atas pertama-tama perlu disadari sebagai ancaman nyata terhadap kedaulatan bahasa Indonesia.

Beberapa waktu terakhir, beberapa media sosial seperti *Twitter*, *Instagram*, *Facebook* dan *Youtube* dibikin ramai oleh warganet oleh kemunculan istilah dan ungkapan *jujurly*, *literally ini tuh perfect banget*, *which is bikin jadi worth it banget* *ngak sih*, dan masih banyak lagi. Mirisnya, fenomena ini tidak saja menjangkiti generasi muda di daerah perkotaan dan metropolitan tetapi juga para politisi dan figur publik lainnya bahkan anak-anak usia sekolah dasar pun ikut ‘tercebur’ dalam praktik

² Amandus Klau, “Kedaulatan Bahasa Indonesia di Era Keterbukaan”, *Pos Kupang*, 25 November 2017.

berbahasa yang salah ini. Menyikapi fenomena tersebut, pada awal Oktober 2019 lalu, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Perpres tersebut sesungguhnya merupakan penegasan secara mendetail dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang penggunaan bahasa Indonesia, baik bagi para pejabat maupun masyarakat, baik dalam rutinitas kegiatan sehari-hari maupun forum-forum internasional. Langkah yang diambil oleh pemerintah ini patut diapresiasi. Namun, apa boleh dikata, Perpres tersebut belum seutuhnya membuahkan hasil yang baik.

Endar Purwaningrum dan Hastuti Redyanita dalam "*Pencampuran Bahasa (Indonesia-Inggris) dalam Penyampaian Makna dalam Komunikasi Sehari-hari*" menjelaskan hasil penelitiannya tentang fenomena pencampuradukan bahasa Indonesia dan Inggris. Penelitian tersebut menjadikan mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta sebagai sampel penelitiannya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, sebagian besar (99%) responden terdeteksi menggunakan bahasa campuran (Indonesia dan Inggris) dalam komunikasi mereka setiap hari bahkan dalam konteks formal sekalipun (kuliah, seminar dan lain sebagainya). Secara umum, para responden mengakui bahwa alasan mereka menggunakan bahasa campuran tersebut bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Mereka menggunakan bahasa campuran karena merasa diri gaul, keren dan dapat mengekspresikan ide secara lebih baik. Jika kita kaji secara lebih cermat, fenomena ini bukanlah fenomena yang tergolong baru. Penulis mengafirmasi bahwa praktik berbahasa yang salah dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta adalah salah satu dari banyaknya kasus yang ada di Indonesia. Penulis mengafirmasi bahwa tidak menutup kemungkinan dalam skala yang lebih luas, fenomena yang sama kerap dijumpai.

Ketika dunia memasuki era turbulensi³, tatanan dunia cenderung berubah dan sulit ditebak. Penjajahan yang seyogianya berakhir pada Perang Dunia II serta

³ Era turbulensi merupakan suatu situasi di mana umat manusia menghadapi ketidakpastian kondisi global. Hal ini ditandai dengan ketidakstabilan pelbagai lini kehidupan umat manusia, mulai dari ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan masih banyak lagi. Dalam pengertian yang lebih integral, era ini ditandai dengan adanya "guncangan" yang tidak dapat terhindarkan. Menghadapi era

ditandai dengan bebasnya negara-negara dunia ketiga dari intimidasi dan intervensi negara-negara Barat ternyata belum berakhir. Secara spesifik, penjajahan terdiri atas dua, yakni penjajahan klasik dan penjajahan modern. Lantas, bagaimana membedakan keduanya? Secara gamblang, penjajahan klasik selalu ditandai dengan kedatangan bangsa penjajah dengan merampas semua sumber daya alam, penerapan sistem kerja paksa, pemberlakuan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap bangsa penjajah dan pelbagai praktik lainnya. Sedangkan, penjajahan modern merupakan bentuk penjajahan secara kasat mata.

Penjajahan modern merupakan bentuk transformasi dari penjajahan klasik. Penjajahan modern yang masif digencarkan oleh “negara-negara kuat” secara membabi buta ini sesungguhnya telah menyusupi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, pendidikan, teknologi dan pelbagai sisi penting kehidupan umat manusia. Hal inilah yang diartikan sebagai penjajahan modern. Sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, pendidikan, teknologi dan pelbagai sisi kehidupan bangsa Indonesia, apakah bahasa Indonesia masih dapat dikatakan berdaulat, bebas dari intervensi dan kepentingan “negara-negara kuat” dalam melanggengkan kekuasaan dan dominasinya?

Sejarah mencatat bahwa kejayaan bahasa-bahasa besar di dunia selalu diimbangi dengan faktor politik dan ekonomi. Sebagai contoh, dominasi bahasa Inggris sebagai bahasa internasional terkait dengan imperialisme Inggris ke negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika. Kemenangan negara-negara sekutu (yang sebagian besar berbahasa Inggris) dalam Perang Dunia II turut mengukuhkannya.⁴ Sebagai negara berkembang, Indonesia kerap menjadi lahan subur dalam proliferasi nilai-nilai

ini, umat manusia dituntut untuk melakukan transformasi diri. Secara etimologis, kata turbulensi berasal dari kata bahasa Inggris, ‘*turbulence*’. Lebih lanjut, *Oxford Dictionary* mendefinisikan kata ‘*turbulence*’ sebagai 1. *A situation in which there is a lot of sudden change, confusion, disagreement and sometimes violence.* 2. *A series of sudden and violent changes in the direction that air or water is moving in.*

⁴ Surahmat, “Meskipun Baik, Mengapa Perpres Bahasa Indonesia Tidak Akan Efektif”, dalam *theconversation.com*, <https://theconversation.com/meskipun-baik-mengapa-perpres-bahasa-indonesia-tidak-akan-efektif-125721>, diakses pada 18 September 2022.

kebaratan yang secara perlahan mulai memberangus nilai-nilai kelokalan, termasuk kecintaan bangsa Indonesia terhadap bahasa Indonesia sendiri. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa asing (Inggris) ketimbang bahasa nasionalnya sendiri, yakni bahasa Indonesia. Tak sebatas itu, pencampuradukan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris dalam berkomunikasi sudah menjadi hal yang biasa. Padahal, jika kita berpikir lebih jernih, fenomena tersebut sedang mengancam kedaulatan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia. Orang merasa lebih percaya diri dan superior ketika fasih berbahasa Inggris ketimbang bahasa Indonesia. Jika fenomena seperti ini masih tetap dianggap sebagai hal yang normal dan biasa saja, maka tinggal menunggu bom waktu saja, bahasa Indonesia akan mengalami kepunahan. Berbicara menggunakan bahasa tidak melulu berkaitan dengan tindakan komunikatif belaka. Tak sebatas itu, tindakan berbahasa tidaklah melulu berkaitan dengan unsur gramatikal semata. Akan tetapi, jauh daripada itu, berbicara menggunakan bahasa tertentu secara kasat mata dapat diasumsikan sebagai menerima, mendukung, dan melanggengkan suatu peradaban.

Berdasarkan sejumlah pertimbangan atas persoalan di atas, penulis tertarik untuk membaca fenomena kebahasaan masyarakat Indonesia yang akhir-akhir ini cenderung mencampuradukkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris pun mengabaikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Fenomena yang ditampilkan oleh para penutur tersebut seyogianya telah mereduksi makna bahasa menjadi kian kabur dan sempit ruang lingkupnya. Pada hemat penulis, fenomena ini seharusnya mendorong para penutur bahasa Indonesia untuk berani melihat makna substansial yang terkandung di dalamnya. Fenomena ini, sekali lagi, tidak boleh dilihat hanya sekadar kulit luarnya saja. Perlu ada upaya intensif untuk menangkalnya.

Frantz Fanon merupakan salah satu filsuf yang cukup moncer dalam kajian pascakolonialisme. Dalam karya termasyurnya *Black Skin, White Masks*, Fanon secara terang-benderang menjelaskan tentang kuasa bahasa dan rasialisme yang secara utuh termaktud dalam konsepnya tentang “*Manusia Kulit Hitam dan Bahasa*”.

Fanon menulis secara jujur bahwa semua masyarakat terjajah sesungguhnya adalah orang-orang yang di dalam jiwanya tertancap sindrom inferioritas, di mana budaya lokal aslinya terkubur. Dalam keberlangsungannya, mereka selalu berhadapan dengan bahasa yang “memperadabkan” mereka, yaitu budaya metropolitan. Semakin intensif mereka berasimilasi dengan nilai-nilai budaya penjajah, semakin besar kemungkinan terangkatnya derajat mereka. Atau dengan kata lain, semakin mereka berusaha meninggalkan “kehitamannya”, semakin beradab kemanusiaannya.

Bagi Fanon, tindakan berbicara tidak hanya berarti menggunakan suatu sintaksis yang khusus serta menggunakan morfologi bahasa tertentu. Namun, jauh daripada itu, berbahasa menggunakan bahasa tertentu sesungguhnya menandakan bahwa kita menerima suatu kebudayaan tertentu serta mendukung suatu peradaban yang didukung oleh bahasa tersebut.⁵ Lebih lanjut, Fanon menjelaskan bahwa dalam praktik penjajahan, telah tercipta suatu struktur yang menempatkan penjajah sebagai yang superior (yang lebih tinggi) dan kaum terjajah sebagai pihak yang inferior (yang lebih rendah). Sekali lagi, kita perlu kritis, bahwasanya penjajahan tidak hanya terjadi melalui gencatan senjata, tetapi juga melalui budaya. Struktur ini kemudian disebarkan oleh para penjajah melalui interaksi sosial dalam masyarakat era kolonialisme hingga tertanam secara luas.

Oleh karena struktur dominasi ini, Fanon menjelaskan bahwa masyarakat terjajah akan menganggap dirinya sesuai dengan definisi penjajahnya. Sebagai contoh, masyarakat terjajah akan menganggap dirinya setara dengan kaum penjajah apabila ia fasih menggunakan bahasa kaum penjajah tersebut. Padahal, kendatipun fasih menggunakan bahasa kaum penjajah, kaum terjajah tidak bisa diidentikkan begitu saja dengan kaum penjajah. Konsep berpikir seperti ini secara kasat mata akan membuat masyarakat terjajah merasa rendah diri, inferior dan menolak identitasnya sendiri. Konsekuensi logisnya adalah kaum terjajah akan berupaya untuk berlaku dan berpenampilan semirip mungkin dengan penjajahnya agar dapat terlihat setara.

⁵ Muhammad Taufiqurrohman, *Frantz Fanon Kebudayaan dan Kekuasaan* (Sleman: Resist Book, 2018), hlm. 107.

Menyikapi hal tersebut, Fanon, dalam bukunya *The Wretched of The Earth*, menyatakan pentingnya budaya dalam membentuk kesadaran nasional. Paradigma kaum terjajah yang selalu merasa inferior perlu bangkit dari keterpurukannya dengan membentuk kesadaran nasional. Masyarakat bekas penjajahan perlu menata dan melihat kembali sejarah guna menyadari identitas mereka.

Sudah sepatutnya, diskursus tentang carut-marutnya situasi kebahasaan kita dibangun dan dikembangkan lebih lanjut. Jean Baudrillard, sebagaimana dikutip Yudi Latif dan Idi Subandy dalam *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, menegaskan bahwa monopoli yang sesungguhnya tidaklah melulu melalui sarana teknis, tetapi juga monopoli dapat ditemukan dalam tindakan berbicara.⁶ Pada titik ini, kita seharusnya paham bahwasanya bahasa merupakan suatu hal yang erat kaitannya dengan kekuasaan dan politik. Bahasa seharusnya tidak dipandang dalam arti yang sempit dan asal-asalan. Sebab, melalui bahasa para individu maupun kelompok tertentu dapat mengejar kepentingan dan memamerkan kompetensi praksis mereka. Sadar atau tidak, upaya untuk mengejar kepentingan dan kompetensi praksis individu dan kelompok tertentu ini semakin diperlancar dengan adanya digitalisasi yang saban hari semakin menunjukkan taringnya. Sudah sepatutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi bangsa Indonesia ditempatkan pada tataran yang lebih tinggi tanpa memandang rendah eksistensi bahasa-bahasa lain di dunia. Upaya tersebut seyogianya tercermin melalui praksis berbicara bangsa Indonesia, bukan sebaliknya.

Atas dasar beberapa pokok pikiran di atas, penulis hendak membahas secara lebih intensif problem aktual ini dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“KEDAULATAN BAHASA INDONESIA DI ERA DIGITAL (TELAAH KRITIS BERDASARKAN KONSEP “MANUSIA KULIT HITAM DAN BAHASA” MENURUT FRANTZ FANON)”**. Karya ilmiah ini merupakan upaya penulis untuk mengkritisi realitas yang sedang marak terjadi. Penulis hendak

⁶ Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim (ed.), *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru* (Bandung, 1996), hlm. 15.

menyelisik kedaulatan bahasa Indonesia di tengah gempuran era digital. Tak sebatas itu, penulis juga menekankan fungsi bahasa Indonesia sebagai medium persatuan bangsa Indonesia serta mengajak para penutur bahasa Indonesia untuk bangga menggunakan bahasanya sendiri, yakni bahasa Indonesia.

1.2 RUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasar pada naungan tema di atas serta latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis mengemukakan tiga rumusan permasalahan yakni, *Pertama*, bagaimana kedaulatan bahasa Indonesia di era digital? *Kedua*, bagaimana pengaruh teknologi digital terhadap kedaulatan bahasa Indonesia? *Ketiga*, apa relevansi pemikiran Frantz Fanon terhadap kedaulatan bahasa Indonesia di era digital?

1.3 TUJUAN PENULISAN

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk, *Pertama*, mendeskripsikan tentang kedaulatan bahasa Indonesia di era digital. *Kedua*, mendeskripsikan pengaruh teknologi digital terhadap kedaulatan bahasa Indonesia. *Ketiga*, menjelaskan relevansi pemikiran Frantz Fanon tentang konsep “*Manusia Kulit Hitam dan Bahasa*” terhadap kedaulatan bahasa Indonesia di era digital. Dan yang *Keempat*, selain untuk memenuhi keinginan dan memberikan kepuasan intelektual bagi penulis, tulisan ini juga ditulis untuk memenuhi persyaratan; memperoleh gelar kesajaraan (S-1 Filsafat) pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero-Maumere.

1.4 METODE PENULISAN

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif lewat studi kepustakaan. Penulis berusaha untuk memahami dan mendalami konsep kedaulatan, bahasa Indonesia, era digital, dan “*Manusia Kulit Hitam dan Bahasa* menurut Frantz Fanon”, melalui literatur-literatur, baik yang berbahasa asing maupun berbahasa Indonesia dalam bentuk buku-buku, kamus-kamus, jurnal ilmiah, artikel-artikel dari surat kabar dan majalah, dialog-dialog pada media sosial serta artikel-artikel dari situs internet yang memiliki ikatan relasional dengan tema yang penulis kaji. Selain sejumlah sumber kepustakaan yang telah dijabarkan di atas,

penulis juga mengembangkan refleksi kritis pribadi dalam mengkaji tema penulisan karya ilmiah ini. Refleksi kritis penulis akan dikaitkan dengan sejumlah fenomena aktual yang menjadi dasar penulis untuk melihat kedaulatan bahasa Indonesia di era digital. Penulis dalam karya ilmiah ini menempatkan diri sebagai subjek yang membaca dan merefleksikan sumber kepustakaan tersebut di atas demi memberikan penjelasan rasional-teoretis tentang tema yang dibahas.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Karya ilmiah ini, dengan demikian, akan ditulis dalam lima bab. Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan catatan pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Tujuan Penulisan, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi tentang Tinjauan Pustaka.

Bab III berisi tentang penjelasan-penjelasan mengenai bahasa Indonesia dan era digital.

Bab IV merupakan bagian inti dari penulisan skripsi ini. Penulis akan menjelaskan problem kedaulatan bahasa Indonesia di era digital dalam terang pemikiran Frantz Fanon tentang konsep “*Manusia Kulit Hitam dan Bahasa*”.

Sebagai penutup, pada bab V ini penulis akan membuat sebuah rangkuman yang berisi tentang kesimpulan dan usul saran.